



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MASTUR
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN
3. NHK : 210312

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.027.499.130

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m<sup>2</sup>/96 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 326 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 130.400.000
4. Tanah Seluas 102 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
5. Tanah Seluas 84 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 747.099.130

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 349.410.000

1. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA A1FO2N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.910.000
3. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0L Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.237.484.977

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	4.614.394.107
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.614.394.107

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.